

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemandirian pangan menjadi hal yang berimplikasi kuat dengan kemampuan ekonomi di suatu negara atau daerah. Hal ini membuat negara atau pemerintah merumuskan formulasi yang mengedepankan terpenuhinya seluruh kebutuhan pangan dan ekonomi secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Menteri pertanian menyatakan bahwasanya ketahanan pangan merupakan sebuah kekuatan negara dan bangsa serta tidaklah berarti apapun kekuatan yang kita miliki bila kita sendiri membiarkan aspek ketahanan pangan ini memiliki masalah Lembaga Ketahanan Nasional RI (2020) ini menunjukkan bahwasanya sangatlah penting bagi seluruh elemen bangsa dan negara bahwasanya ketahanan pangan memiliki sebuah akses yang sangat penting untuk menunjukkan sebuah kedaulatan negara dengan sungguh-sungguh. World Bank (2023) menyatakan bahwasanya inflasi dari harga pangan domestik tetap tinggi dan hampir merata di seluruh dunia, bahkan bukan hanya negara menengah kebawah saja yang mengalaminya, tetapi negara dengan penghasilan menengah ke atas juga mengalami dampak dari inflasi harga pangan. Nilai inflasi harga pangan terekam pada negara dengan penghasilan rendah mencapai 5% lebih dengan asumsi lebih dari 64,7% negara menengah kebawah, 83,7% pada negara berpenghasilan menengah ke bawah dan mencapai pada 89% pada negara dengan penghasilan menengah ke atas. Pada negara yang berpenghasilan tinggi juga tidak luput dari ancaman inflasi, tercatat pada 81,8% negara berpenghasilan tinggi. Laporan World Bank (2023) juga menunjukkan bahwasanya yang paling terpengaruh akibat permasalahan ini adalah banyak negara yang ada di sekitar Afrika hingga Asia Tengah.

Aspek kerawanan pangan ini juga ditegaskan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fox et al (2009) didalamnya ditegaskan

bahwasanya terdapat perubahan yang mendasar dan merupakan sebuah sistem yang sebelumnya selama berabad-abad belum pernah terjadi dan hampir merata di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dalam temuan ini, peneliti sebelumnya mendasari banyaknya persoalan perladangan yang kemudian berubah dengan beralih cukup cepat dan masif yang hampir penyebab utamanya adalah lingkungan politik yang terjadi di lingkungan ekonomi para petani. Pada tahun 2021, menurut laporan dari BRIN (2022) Negara Indonesia adalah salah satu negara sebagai penghasil produksi beras terbesar dengan total capaian luasan sawah sebesar 8,1 juta ha dengan luas panen hingga 10,41 juta ha. Pada tahun 2021-pula mencatatkan bahwa konsumsi beras perkapita cukup tinggi, yakni pada angka 114,6 kg per orang setiap tahunnya. Peristiwa semacam ini mengharuskan pemerintah untuk merumuskan sebuah prospek ketahanan pangan pokok bagi sekitar 273 juta penduduk.

Sebagai negara yang memiliki potensi agraria yang cukup besar, Pemerintah Indonesia memiliki sebuah program ketahanan pangan atau *food estate*. Istilah *food estate* ini kerap sekali digunakan untuk kegiatan usaha budi daya tanaman skala luas yang mencakup lebih dari 25 hektar (ha) dengan konsep industri pertanian yang bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, dan organisasi dan dukungan manajemen modern (Tempo.co 2023). Layaknya sebuah langkah preventif dari pemerintah untukantisipasi kemungkinan buruk dari adanya krisis pangan, program ini dicanangkan dapat menjadi sebuah solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dengan harga yang relatif rendah. Sebagai sebuah kawasan daerah yang mampu berkembang secara maksimal terutama dalam bidang pertanian yang menjadi salah satu andalan dari Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah memaksimalkan potensi ini dengan berbagai inovasi yang diluncurkan untuk dapat mampu mengatasi berbagai konteks permasalahan yang ada untuk diselesaikan. Di era perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju seperti saat ini hampir semua sektor sangat dipengaruhi oleh berbagai dinamika digital yang menyertai. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah memproyeksikan bahwa kebutuhan yang

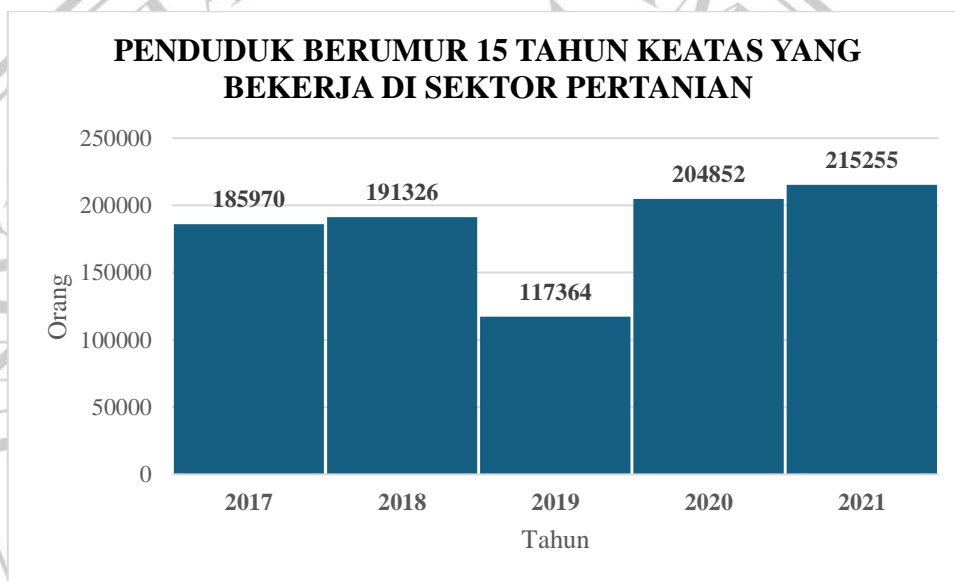
akan didigitalisasi saat ini dan kedepan sudah meliputi berbagai sektor untuk dilibatkan secara langsung. Semua dipetakan menjadi berbagai macam kompetensi yang diperkirakan akan berdampak positif dalam tindakan maju dalam menyambut datangnya bonus demografi di daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Maka dari itu, atas dasar pertimbangan yang cukup, pemerintah daerah meyakinkan diri untuk maju dengan berbagai potensi dengan dorongan sumber daya manusia yang mumpuni dengan tantangan baru kedepan, dan jawaban yang paling tepat adalah digitalisasi di sektor pertanian untuk memudahkan para calon hingga petani yang berusia muda atau produktif ini sebagai konsep untuk memudahkan mereka dalam memecahkan masalah di sektor pertanian ini.

Data sensus pertanian 2013 yang dikutip dari Vanda Ningrum (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar petani terdiri dari kelompok usia 45-54 tahun dengan capaian 7.325.714 jiwa. Yang secara tidak langsung telah terpetakan bahwa usia masyarakat yang bertani saat ini sudah tidak muda lagi, dan menurut peneliti ini adalah ancaman yang harus benar-benar diperbaiki baik oleh pemerintah secara umum dan serius. Karena urusan yang menyertai berbagai masalah ini adalah ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Melihat masalah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melihat potensi yang ada di daerah sangat potensial untuk memutus permasalahan semacam ini. Ikhtiar pemerintah daerah yang paling memungkinkan adalah digitalisasi sektor pertanian dengan berbagai konsep penyelesaian masalah yang mudah dan memudahkan bagi para generasi penerus petani yang berusia muda dan produktif.

Usaha pertanian di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan nilai positif dengan angka produksi yang cukup tinggi dengan menunjukkan bahwa angka produksi beras masih diatas nilai konsumsi warga Banyuwangi per kapita per tahun. Sebagaimana dilansir dari Republika (2021) riset yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwasanya konsumsi masyarakat Kabupaten Banyuwangi per kapita per tahun pada tahun 2021 adalah sekitar 94,47 Kg. Target yang dicanangkan oleh Pemkab Banyuwangi sekitar 491.000-ton pada tahun 2021 dan ternyata masih surplus hingga 325.000-ton

karena tingkat konsumsi yang hanya mencapai 165.000-ton di tahun 2021. Hasil seperti ini merupakan sebuah keberlimpahan yang dimiliki oleh Banyuwangi dengan beragam potensi yang mampu memberikan swasembada pangan secara maksimal untuk terwujudnya kedaulatan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Berkenaan dengan pembahasan ketahanan pangan, bila ditinjau lebih jauh memang Banyuwangi mampu mandiri dari aspek pangan utama atas target yang telah tercapai.

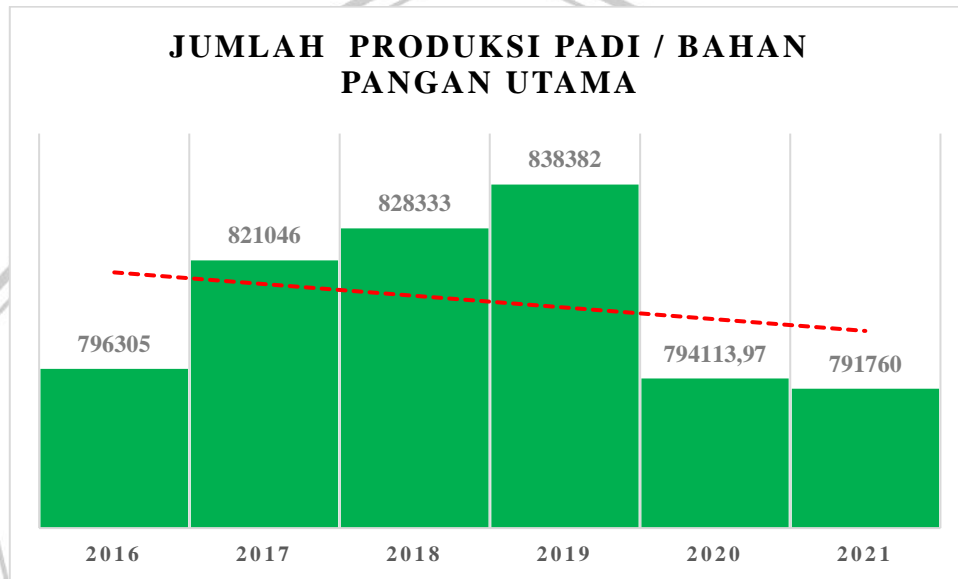
**Diagram 1. 1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja di sektor Pertanian.**



Sumber: BPS Kab Banyuwangi

Salah satu indikator bahwasanya Pemkab Banyuwangi cukup serius dengan berbagai ancaman dengan potensi ketahanan pangan dan saat ini sudah mulai terlihat adalah indikator bahwa masyarakat yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan adanya pertumbuhan yang didominasi oleh usia produktif diatas 15 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya pertanian telah kembali menjadi daya tarik baru bagi generasi mayoritas berusia muda untuk menjadi sebuah sumber penghidupannya. Ada yang menarik bila ditinjau dari data tahun 2022 yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi mengenai hasil produksi padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Banyuwangi.

**Diagram 1. 2 Data Produksi Padi/Bahan Pangan Utama.**

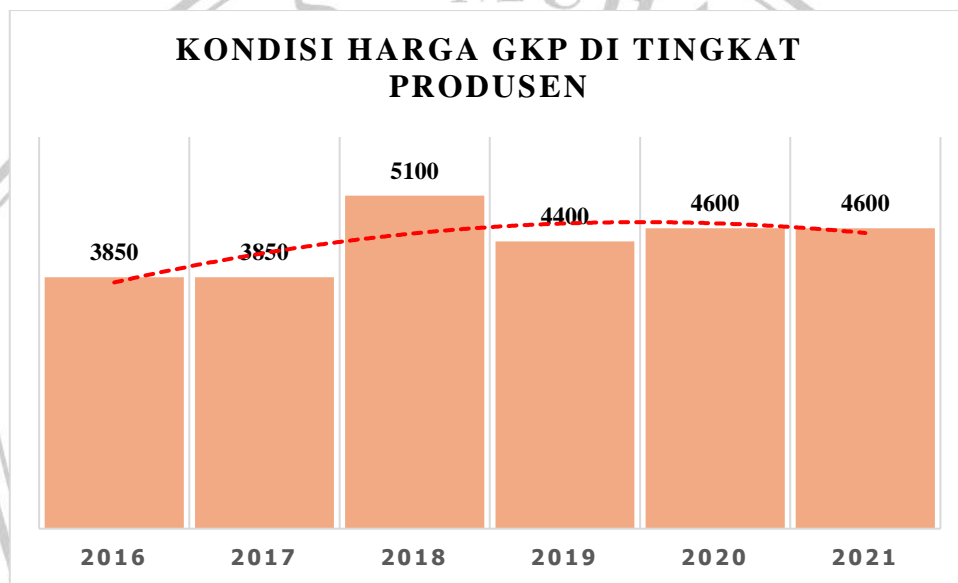


Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

Dari konteks data ini, terjadi penurunan jumlah produksi padi/bahan pangan utama di Kabupaten Banyuwangi bila dibandingkan dengan tahun 2020 hingga sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwasanya ada anomali pertumbuhan produksi pertanian di Banyuwangi yang mendukung para petani untuk melakukan alih tanaman, yang seharusnya lahan pertanian ditanami tanaman pangan padi menjadi komoditi pertanian yang lain. Seperti buah naga dan jeruk siam di kalangan petani daerah. Ini menunjukkan bahwasanya para petani juga mempertimbangkan kondisi yang akan mereka alami pasca mereka panen dengan tindakan perubahan pola dan siklus tanam komoditas pertanian yang mereka lakukan dengan maksimal. Perubahan komoditas yang ditanam oleh petani di Banyuwangi dibuktikan dengan kondisi harga komoditas padi yang terekam oleh data Gabah Kering Panen (GKP) di Banyuwangi yang

mengalami penurunan harga pada akhir tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlampir data yang menunjukkan bahwasanya ada perubahan data yang menunjukkan harga komoditas pertanian padi di Banyuwangi yang telah dilansir dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

**Diagram 1. 3 Kondisi Harga GKP di Tingkat Produsen.**



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

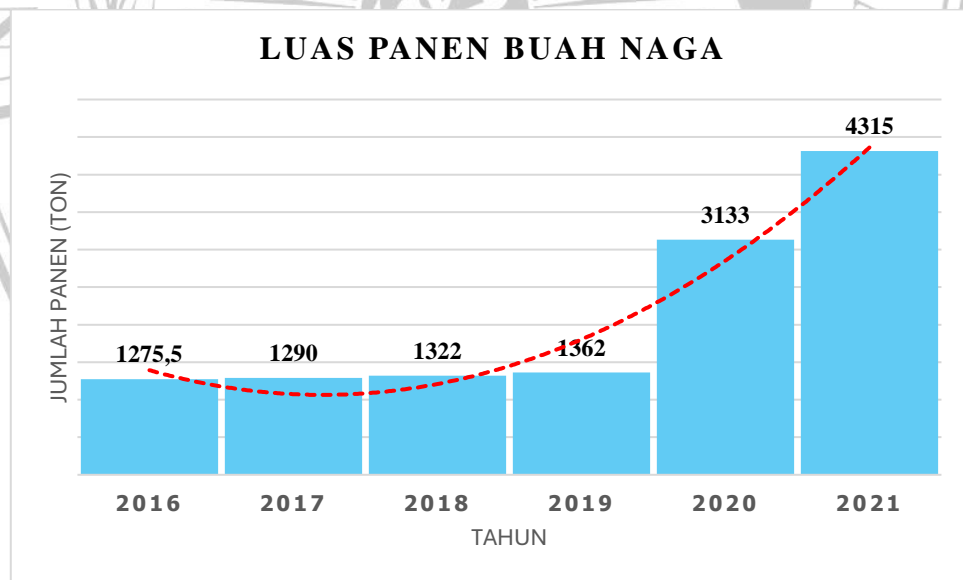
Dari sini, telah ditunjukkan bahwasanya ada penurunan harga jual produk di kalangan produsen terhadap harga barang yang telah di produksi oleh petani. Sedangkan pada sisi komoditas yang lain menunjukkan bahwasanya ada kenaikan yang menunjukkan kenaikan secara signifikan dengan dominan. Dari data yang sudah dianalisis, nampak terdapatnya tren yang cukup mencolok dalam pasar barang. Pertama- tama, bisa dicermati jika harga jual produk di kalangan produsen mengalami penyusutan yang cukup mencolok dibandingkan dengan harga benda yang sudah diperoleh oleh para petani. Kejadian ini bisa jadi membawa alamat terdapatnya titik berat kepada profitabilitas produsen dalam suasana khusus, yang bisa jadi

diakibatkan oleh faktor- faktor semacam kompetisi yang kencang ataupun pergantian dalam biaya produksi.

Di sisi yang berlawanan, informasi membuktikan kalau sebagian barang hadapi kenaikan harga yang penting, apalagi memimpin gaya pasar. Perihal ini dapat melukiskan permohonan yang besar buat komoditas- komoditas khusus ataupun apalagi permasalahan cadangan yang menyebabkan kenaikan harga. Eskalasi harga yang berkuasa ini bisa mempunyai akibat yang penting pada ekonomi regional maupun nasional, serta bisa jadi butuh diperhatikan lebih lanjut oleh para pakar ekonomi serta pemilik kebijaksanaan.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kerumitan pasar barang serta pergantian yang bisa terjalin dalam waktu durasi khusus. Analisa lebih lanjut serta kontrol pasar yang teliti bisa jadi dibutuhkan buat menguasai faktor- faktor yang mempengaruhi pergantian harga dalam produksi ini.

**Diagram 1. 4 Luas Panen Buah Naga di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2021**



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

Dari data diatas, dapat diketahui bersama bahwasanya peningkatan produksi luas panen komoditas buah naga di Kabupaten Banyuwangi meningkat secara signifikan pada beberapa waktu kebelakang. Misalnya pada tahun 2019, nilai luasan

panen buah naga di Banyuwangi hanya sekitar 1362 hektar lahan kemudian meningkat dengan angka yang terbilang cukup tinggi pada tahun 2021 pada angka 4.315 hektar. Dari data ini, telah menunjukkan pergeseran bahwasanya minat petani untuk menanam padi menurun dan cenderung untuk mengganti dengan komoditas yang lain seperti buah naga dan lain-lain. Sebagaimana yang pernyataan petani buah naga di Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya hasil yang didapatkan pada setiap panen buah naga di Banyuwangi mencapai sekitar 6 juta rupiah untuk masa panen diluar panen raya dan menggunakan tambahan metode perawatan menggunakan lampu (Jawa Pos Radar Banyuwangi, 2022)

Sebagaimana yang telah dituliskan dalam penelitian sebelumnya oleh Riera & Swinnen (2016) mengenai transisi pertanian dan ketahanan pangan dalam perspektif global. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya pandangan komparatif mengenai komparatif pertanian tentang transformasi pertanian sebagaimana yang telah dilakukan oleh China pada masa sepeninggal Mao di tahun 1976 yang telah meluncurkan program ekonomi mendasar dan menetapkan sistem tanggungjawab pada ranah rumah tangga untuk kebutuhan pertanian (Huang & Rozelle, 1996). Selain itu, riset sebelumnya yang dilakukan oleh Promkhambut et al (2023) menunjukkan bahwasanya sebuah persoalan yang merujuk pada reformasi agraria dengan keberpihakan terhadap masyarakat petani di Thailand menunjukkan bahwasanya perlu mempertimbangkan kekhususan sub-regional dalam sebuah kondisi material dan kekuatan multi skala yang meliputi berbagai faktor yang menguntungkan termasuk dengan kedekatan geografis hingga beraneka transisi dalam reforma agraria yang menguntungkan. Terutama pada ranah petani kecil yang dampaknya berujung pada tindak menurunnya produksi padi di wilayah Thailand maupun di seluruh Asia Tenggara. Sejak 2004 lalu, Belarusia melalui arahan dari Presidennya Lukashenko telah menerapkan dokumen strategis pertanian yang berguna untuk menerapkan ketentuan dan kriteria ketahanan pangan hingga tahun 2030. Dijelaskan pula dalam risetnya oleh Kireyenka (2019) bahwasanya mekanisme baru pemantauan, manajemen, dan regulasi mengenai ketahanan pangan disana telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Studi menunjukkan bahwasanya struktur produksi



pertanian ini menunjukkan bahwasanya memungkinkan untuk menjamin ketersediaan fisik makanan bagi penduduk dengan tingkat konsumsi energi mencapai 3.241 kalori perhari. Bila dibandingkan dengan konsep penelitian sebelumnya yang lain, Henning & Struve (2007) menyatakan bahwasanya homogenitas pelaku pertanian yang memiliki hak suara dalam proses pemilihan parlemen akan sangat menentukan terlaksananya kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani dengan berbagai sisi politik yang mempengaruhi, tentunya preferensi pemilih akan sangat dipengaruhi untuk kekuatan yang sedang dibangun dari bawah, dan penduduk agraris harus bersatu secara maksimal untuk konsep perlindungan pertanian dengan maksimal.

Pada penelitian ini, penyusun berfokus pada analisis kebijakan pertanian di daerah yakni di Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan sebuah skema ketahanan pangan di daerah yang selanjutnya di substansikan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Di dalamnya tertuang mengenai konsep pemberdayaan dan pelaksanaan perlindungan petani untuk dapat bekerja dengan tenang dengan berbagai jaminan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada petani. Beberapa upaya pemerintah daerah tertuang pada pasal 7 ayat 2 pada poin strategi dan perlindungan petani yang berbunyi:

Strategi dan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: Prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian hingga kepastian lahan, inventarisasi dan jaminan ketersediaan air sesuai dengan rencana tanam Kabupaten Banyuwangi, (2019) yang menunjukkan sebuah kompleksitas perlindungan bagi petani dalam menghadapi pertanian yang penuh ketidakpastian terkait dengan kondisi alam hingga keadaan sosial yang penuh dengan spekulasi dan berpotensi mengancam posisi petani dalam menjalankan usaha. Penelitian ini berfokus pada aspek perubahan yang berkaitan langsung dengan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian.

Menurut Nurgiyantoro (2010) menyatakan bahwasanya transformasi merupakan sebuah perubahan yakni perubahan yang merujuk pada suatu hal atau keadaan. Apabila perubahan itu terjadi di pada aspek peraturan maka peraturan itu

yang akan mengalami perubahan. Pada pandangan lain yang dikemukakan oleh Castles (1999) menyatakan bahwa transformasi dapat diartikan sebagai struktur atau rangka (*framework*) yang berguna untuk memahami adanya proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun secara global. Dalam hal ini proses perubahan dan pengembangan yang kemudian diadaptasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui penguatan aspek perlindungan dan pemberdayaan petani pada Perda Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah benar-benar menguatkan pondasi sistem ketahanan pangan dari aspek sumber daya pendukung utama yakni sumber daya manusia di sektor pertanian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada dari apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang, penulis menarik rumusan permasalahan pada skripsi ini, yaitu Bagaimana transformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah maraknya alih tanam komoditas bahan pangan utama di Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disimpulkan hingga tujuan riset ini tidak lain merupakan untuk mengenali wujud alih bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan ketahanan pangan di daerah terhadap maraknya alih fungsi komoditas bahan pangan utama di Banyuwangi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun guna riset ini terbagi menjadi 2 (2) manfaat riset ialah manfaat teoritis serta utilitas efisien:

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah tersampainya sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu terutama ilmu terutama dalam bidang ilmu pemerintahan serta menjadi bahan acuan untuk riset selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini bagi penyusun adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait dengan proses transformasi terhadap kebijakan pertanian yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, manfaat praktis bagi pemerintah adalah diharapkan hasil dari proses penelitian ini dapat menjadi rujukan dari pemerintah dalam proses penetapan kebijakan.

## **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna (definisi) terhadap skema yang dipakai dalam riset. Dari tiap- tiap variabel judul penelitian ini terdapat definisi konsep sebagai berikut:

### **1. Transformasi**

Menurut pandangan Moore (1999) terjadinya transformasi kebijakan pemerintah merupakan sebuah tindakan yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan tindakan nyata dan penerapan nilai kepada masyarakat. Dalam prosesnya, terdapat berbagai keterlibatan pemerintah dalam peran langsung maupun orientasi strategis, pendekatan manajemen hingga kemampuan adaptasi institusi terhadap tantangan yang baru. Pada konteksnya, proses transformasi kebijakan ini merupakan sebuah tantangan yang harus diimplementasikan sesuai dengan tantangan yang ada di daerah sebagai bentuk implementasi dari solusi atas permasalahan yang terjadi.

## 2. Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian merupakan sebuah rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap dunia pertanian untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Menurut David Orden, kebijakan pertanian harus menekankan pada keadilan sosial dan dominan dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Menurutnya, kebijakan pertanian yang berhasil merupakan kebijakan yang unsurnya melibatkan masyarakat kecil dan mengutamakan perlindungan terhadap petani kecil hingga pemberdayaan pengembangan kompetensi di sektor pertanian.

## 3. Ketahanan Pangan

Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization*) menyatakan bahwasanya konsep ketahanan pangan merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara terus menerus dan menekankan pada 4 (empat) pokok utama sebagai pilar terwujudnya program ketahanan pangan yakni aksesibilitas, ketersediaan, kualitas, dan keamanan pangan, serta stabilitas (*Food and Agriculture Organization* 2022). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merujuk pada perlindungan dan pemberdayaan petani untuk keberlanjutan produktivitas pertanian di Banyuwangi yang tertuang pada Perda Kabupaten Banyuwangi No. 02 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan himpunan petunjuk terkait dengan apa yang harus diukur dan diamati dalam variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Dalam hal ini, penyusun menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya oleh Tarigan (2016) tentang konversi pertanian serta darurat air di Bali dalam perspektif ekologi politik. Serta apapun penyusun merumuskan variabel atau konsep untuk pengujian kesempurnaan:

**Tabel 1. 1 Konsep Penelitian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi**

| Konsep   | Indikator  | Sub Indikator  |
|--|--|--|
| Transformasi Kebijakan Pertanian Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Di Kabupaten Banyuwangi | Proses transformasi kebijakan pertanian untuk terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi di tengah maraknya alih fungsi lahan tanam bahan pangan utama | <p>a) Bentuk transformasi kebijakan pertanian di Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b) Aktor yang terlibat dalam terwujudnya program ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c) Dampak Perda No. 02 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>d) Bentuk pemenuhan ketahanan pangan yakni ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan di daerah</p> |

Sumber: Data olahan 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi

### 1.7 Metode Penelitian

Pada riset ini, pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif yang bermaksud guna memahami situasi dan kondisi tanpa adanya kuantifikasi. Menurut Creswell (2014) Metode riset kualitatif adalah salah satu jenis tata cara guna mendefinisikan, mempelajari serta menguasai adanya permasalahan sosial ataupun kemanusiaan. Proses kualitatif ini biasanya dilakukan dengan memberikan berbagai pertanyaan dan kemudian menghitung informasi khusus dari partisipan, melakukan

analisis induktif dari topik umum ke topik khusus, dan memahami makna informasi. Siapapun yang terlibat dalam riset ini wajib mengaplikasikan metode penglihatan penelitian dengan gaya induktif, yang berfokus kepada arti perseorangan, serta mengartikan kerumitan suatu persoalan.

Maka dari itu, diperlukan suatu metode yang mampu membantu penyusun dalam mendapatkan data yang konkrit. Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada studi dengan judul transformasi kebijakan pertanian oleh pemerintah wilayah buat menciptakan daya tahan pangan di Kabupaten Banyuwangi dengan ini pembuat memakai pendekatan kualitatif dengan tipe riset deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dengan tipe riset deskriptif esoknya menciptakan suatu analisa dengan tidak memakai statistika dalam cara analisisnya. Sementara itu kategori penelitian deskriptif analitis ialah suatu riset yang menggambarkan berbagai hal sebagai objek yang sedang diteliti melalui data dan sampel yang telah ditemukan sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif serta penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sebuah pandangan dengan sistematis, konkret dan faktual terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan transformasi kebijakan pertanian di Kabupaten Banyuwangi secara langsung di lapangan. Penelitian secara deskriptif kualitatif ini dipilih dengan pertimbangan supaya penyusun dapat menggambarkan proses transformasi kebijakan pertanian yang telah maupun akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

### **1.7.2. Sumber data**

Dalam penelitian ini untuk dapat menemukan pembahasan dan melakukan analisis mengenai transformasi kebijakan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Maka penyusun kemudian berusaha untuk mendapatkan dua sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber data primer

Wawancara merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan tidak lain dengan tujuan untuk mengumpulkan banyak informasi yang diperoleh dari hasil tanya jawab antara peneliti dengan informan yang kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sumber data primer dapat didapatkan langsung oleh penelitian dari informan-informan yang terkait. Sumber data primer pada penelitian ini dapat diperoleh melalui adanya proses tanya jawab atau wawancara kepada informan yang terlibat oleh peneliti yang mana informan tersebut adalah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki keterlibat dalam proses transformasi kebijakan pertanian untuk ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini proses wawancarailah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data, peneliti melakukan proses wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Tani, serta pejabat dan staf yang berkaitan dengan proses transformasi kebijakan pertanian dalam rangka mewujudkan aspek ketahanan pangan yang dilakukan menggunakan panduan wawancara atau *interview guide* serta dukungan alat *record* yang dijadikan sebagai bukti konkret dalam pelaksanaan penelitian berlangsung.

b. Studi literatur

Studi literatur dapat menjadi bagian dari pengumpulan serta pengambilan inti dari proses penelitian dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literatur ini juga bertujuan untuk mengumpulkan berbagai konsep teori dasar, artikel, serta dokumen pendukung penelitian yang berfungsi untuk menganalisis permasalahan secara terstruktur. Dalam riset ini, data dikumpulkan dengan teknik yang dilakukan melalui studi literatur digunakan oleh peneliti dalam menganalisis literatur dari penelitian terdahulu mengenai aspek kebijakan pertanian terutama yang berfokus pada transformasi kebijakan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan catatan yang diperoleh dari kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, diantaranya dapat berupa tulisan, gambar berupa arsip ataupun pendapat dari seorang ahli yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian dan merumuskan secara konkrit atas rumusan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa data melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen, arsip, gambaran umum, struktur organisasi ataupun personalia pemangku kepentingan terkait.

#### **1.7.3. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Lembaga ini merupakan salah satu unsur pendukung dengan peranan yang cukup penting dalam mewujudkan ketahanan dan stabilitas pangan di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih Dinas Pertanian dan Pangan sebagai lokasi penelitian, karena lembaga ini memiliki peran aktif dalam peran secara langsung dalam aspek pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan petani untuk mewujudkan aspek ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut didasari oleh banyaknya kasus alih tanam komoditas pangan utama di Kabupaten Banyuwangi namun pada hasilnya dapat diketahui bersama bahwa Kabupaten Banyuwangi masih dapat berdaulat secara mandiri terkait dengan ketahanan pangan.

#### **1.7.4. Subjek Penelitian**

Subjek dari riset ini merupakan aktor-aktor yang dapat membagikan informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti terutama tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek pada riset ini diantaranya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Tani, serta pejabat dan staf yang berkaitan pada kebijakan transformasi kebijakan pertanian dalam menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi.



### **1.7.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang diaplikasikan dalam riset ini yakni sebagai pengumpulan data yang terkait dengan transformasi kebijakan pertanian dalam menghasilkan daya tahan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap informan terkait untuk melakukan validasi dan klarifikasi informasi atas data yang telah didapat. Maka dari itu, analisa data yang dipakai merupakan:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data ialah cara meringkas dan menyaring hal-hal penting yang terdapat dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari narasumber. Dalam riset ini, data yang didapat bagus informasi pokok maupun sekunder akan dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti untuk mempermudah dalam memahami data dan lebih difokuskan pada pembahasan pokok dan pada penjelasan yang perlu dijelaskan secara rinci untuk mendukung hasil serta diskusi dalam Transformasi Kebijakan Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi.

#### **c. Observasi**

Observasi merupakan tahap penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui penglihatan, pendengaran, maupun penciuman untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan yakni memperoleh jawaban atas informasi yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian.

Dalam metode pengumpulan data, observasi ini dipakai sebagai alat untuk melihat fakta yang sesuai dengan kondisi lapangan secara langsung selama proses penelitian. Yang mana dalam proses penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dari observasi ini, peneliti melakukan secara langsung dalam proses implementasi dari kebijakan pertanian yang berfokus pada ketahanan pangan di Banyuwangi, yang meliputi tentang ketersediaan pangan, kualitas pangan dan keterjangkauan. Pada tahapan awal observasi, peneliti melakukan riset pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi untuk melihat lebih jauh fakta dan melakukan validasi atas data yang diperoleh sebelumnya. Kemudian pada tahapan berikutnya, peneliti melakukan observasi lanjutan dengan melihat data dan fakta yang telah diberikan oleh

pemangku kepentingan yang terjadi di lapangan dengan aspek tinjauan data yang sudah diperoleh sejak awal yakni dari pra-observasi yang sudah dilakukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data pada hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk teks naratif yang akan disertai dengan diagram-diagram dan gambar lain yang mendukung proses penelitian. Yang mana pada tahap ini peneliti akan memberikan uraian dari hasil wawancara bersama narasumber atau informan dengan jelas dan rinci sesuai dengan indikator maupun fenomena sosial yang telah ditemukan di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dicoba untuk tujuan memperoleh hasil data yang konkrit sesuai dengan analisis penelitian, penggabungan data satu dengan data lainnya dilakukan. Yang mana proses penarikan kesimpulan awal dapat bersifat sementara sebelum adanya bukti yang kuat dan konsisten di lapangan. Oleh karena itu, agar kesimpulan akhir dapat dirumuskan dengan jelas dan baik, peneliti harus mengumpulkan data yang kuat dan konsisten.

**1.7.6. Waktu Penelitian**

Tahapan pelaksanaan penelitian merupakan tahap dokumentasi penelitian secara keseluruhan yang akan dilampirkan pada laporan penelitian. Berikut merupakan alur perencanaan pelaksanaan penelitian, antara lain:

**Tabel 1. 2 Waktu Pelaksanaan Penelitian**

| Kegiatan                    | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Persiapan                   |         |         |         |         |
| Obervasi Lapangan           |         |         |         |         |
| Penelitian dan Olah Data    |         |         |         |         |
| Menyusun Laporan Penelitian |         |         |         |         |

*Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.* Sumber: Data diolah 2023